

**MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
GUNA MENYONGSONG BERLAKUNYA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2016
(STUDI DI KOTA LHOKSEUMAWE)**

FAJRI

Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Malikussaleh
Bukit Indah Lhokseumawe Aceh,
Email: fajri_mkasim@yahoo.co.id

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti bentuk keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat dimulai dari penyusunan rencana sampai evaluasi hasil kerja. Upaya menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, pemerintah perlu menerapkan pola yang bisa memberikan motivasi pada masyarakat dalam pembangunan. Peran pemerintah sangat besar untuk mengembangkan masyarakat dengan memperkuat modal sosial terlebih dahulu sebelum pemerintah mengharapkan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah mempunyai andil yang besar dalam mengembangkan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas, bila pengembangan masyarakat telah berhasil terlaksana, pemerintah telah mudah mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pembangunan partisipatif menurut konsep sekarang mempertemukan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*), pendekatan modal sosial dalam pembangunan memberikan dampak yang lebih nyaman dan kondusif, dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atas dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*), yang menekankan keputusan di tangan masyarakat adalah konsep ideal pembangunan. Pembangunan yang mempertimbangkan kearifan lokal seperti revitalisasi untuk saling menghargai antara yang muda dengan yang tua, memiliki jiwa dan semangat saling membantu (*bergotong royang*), bank mawah (unit pemodalan dan simpan pinjang syariah model masyarakat ekonomi menengah ke bawah) dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang handal produk Lembaga pendidikan yang memiliki kualitas, serta kemampuan komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa internasional adalah modal yang penting dalam menghadapi dimulainya penerapan *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)* pada tahun 2016.

Kata Kunci: Modal sosial, Pembangunan Partisipatif, Kearifan Lokal, MEA

A. Pendahuluan

Perkembangan paradigma dan teori pembangunan telah mengalami perubahan sejak 30 tahun lalu. Perubahan ini dipicu oleh ketidakpuasan pada perkembangan pembangunan di banyak negara berkembang dan negara miskin di benua Asia dan Afrika. Paradigma pembangunan yang ada sebelumnya telah menjerumuskan negara-negara tersebut dalam kemiskinan akibat lemahnya kontrol negara terhadap pengaruh dan intervensi negara asing dalam bidang perekonomian, perdagangan, industri, budaya, dan politik, yang berimbas pada lemahnya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pola kebijakan dari atas ke bawah (model *Top-down*) sudah tidak relevan lagi. (Halil : 2011)

Ditambahkan oleh Halil (2011) Perubahan paradigma pembangunan dewasa ini, pada banyak negara belum juga berdampak positif bagi masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya membebaskan bangsa dari keterbelakangan senantiasa tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Hal ini erat kaitannya dengan tidak dimasukkannya modal sosial sebagai faktor penting dalam mempengaruhi efisiensi dan efektifitas kebijakan. Kenyataan ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya dimensi kultural dan pendayagunaan peran lembaga-lembaga yang tumbuh dalam masyarakat untuk mempercepat dan mengoptimalkan proses-proses pembangunan. Fukuyama (2002) misalnya menyebutkan faktor kultural, khususnya modal sosial menempati posisi yang sangat perifer sebagai faktor yang menentukan kualitas masyarakat.

Namun demikian, Hasbullah (2006) menekankan bahwa memasukkan modal sosial sebagai salah satu komponen pembangunan tidaklah mudah. Di masing-masing daerah atau negara, spektrum modal sosial tersebut dengan berbagai dimensinya, bervariasi tergantung pada sejarah kebudayaan wilayah atau daerah tersebut. Serta struktur sosial dan peradaban yang telah terbentuk cukup lama sesuai dengan lingkungannya. Hubungan yang terbentuk antara kultur dan institusi, bagaimanapun memiliki jalinan yang sangat kompleks. Namun keberadaan institusi dan lembaga dalam masyarakat tidak dapat terbangun dengan kuat tanpa modal sosial, demikian juga sebaliknya, modal sosial pun tidak dapat eksis tanpa institusi yang menopangnya.

Saat ini, semakin banyak pihak yang memberikan perhatian yang besar terhadap modal sosial (*social capital*) dalam pembangunan dari praktek aktivitas-aktivitas *social capital* yang dibentuk dan dilembagakan oleh warga masyarakat lokal. Para ahli telah

meyakini dan menyepakati bahwa capital-capital yang ada dalam masyarakat (*human capital, institutions dan social capital*) bukan sekedar konvensional capital yang berupa modal fisik, namun capital non-fisik tersebut memiliki kemampuan memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pembangunan masyarakat yang semakin meluas dan merata.

Mengenai Modal Sosial dalam pembangunan, menurut Suandi (2007) Modal sosial dikategorikan melalui dua dimensi yang saling berhubungan: (1) dimensi struktural yaitu diukur melalui tinggi rendahnya kontribusi asosiasi lokal. Asosiasi lokal yang terdapat pada masyarakat dapat diidentifikasi tinggi, yaitu dilihat dari jumlah asosiasi yang diikuti, partisipasi maupun manfaat dari asosiasi lokal. Hal ini mengindikasikan asosiasi lokal dinilai penting oleh warga, baik asosiasi formal maupun nonformal. Asosiasi lokal yang terdapat di masyarakat adalah kelompok pengajian, arisan, KUD, kelompok tani dll, dan (2) dimensi karakter masyarakat yaitu mencakup: tingkat keterpercayaan masyarakat, Karakter masyarakat dapat dilihat dari nilai keterpercayaan, solidaritas dan semangat kerja.

Sangat diharapkan pendekatan pembangunan yang di Indonesia pada Umumnya dan Aceh serta Kota Lhokseumawe pada khususnya dalam rangka memperkuat pembangunan partisipatif, pemerintah harus merubah haluan dalam model pembangunan yang lebih mengutamakan dimensi struktural ke arah Model pembangunan yang menitik beratkan dimensi pembentukan karakter masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan itu sendiri. Terlebih lagi pada awal Tahun 2016 kita sudah menyongsong diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pembangunan yang mempertimbangkan kearifan lokal, sifat saling menghargai dan penguatan kepercayaan antara pemimpin dan rakyat, memiliki jiwa dan semangat saling membantu (bergotong royang), Unit pemodalan dan simpan pinjang syariah dan mengupayakan lahirnya sumber daya manusia yang handal dari rahim lembaga pendidikan tempatan yang memiliki kualitas, serta kemampuan komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa internasional adalah modal yang penting dalam menghadapi dimulainya penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Maka dari itu tulisan ini ingin menjelaskan posisi Kota Lhokseumawe dalam menghadapi MEA yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini.

B. Studi Pustaka

Beberapa pakar pembangunan telah membahas posisi modal sosial dalam memperkuat konsep pembangunan partisipatif, menurut Halil (2011) modal sosial itu sendiri adalah konsep yang muncul dari hasil interaksi di dalam masyarakat dengan proses yang

lama. Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi, dan kemudian menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara untuk mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri. Keadaan ini terutama terjadi pada interaksi yang berlangsung relatif lama. Interaksi semacam ini melahirkan modal sosial; berupa ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panjang. Modal sosial akan tumbuh dan berkembang kalau digunakan bersama dan akan mengalami kepunahan kalau tidak dilembagakan secara bersama, oleh karena itu, pewarisan nilai modal sosial dilakukan melalui proses adaptasi, pembelajaran, serta pengalaman dalam praktek nyata (bukan pewarisan genetik)

Ada beberapa karakteristik yang perlu diketahui mengenai modal sosial. Menurut Cox (1995), karakteristik modal sosial adalah dilahirkan dari bawah (bottom-up), tidak hierarkhis, berdasar pada interaksi yang saling menguntungkan, bukan merupakan produk dari inisiatif dan kebijakan pemerintah dan dapat ditingkatkan atau dihancurkan oleh negara melalui kebijakan public.

Adapun unsur-unsur penting modal sosial menurut Blakeley dan Suggate (1977), dalam Suharto (2007) dalam Halil (2011) adalah: pertama, Kepercayaan: Tumbuhnya sikap saling percaya antar individu dan antar institusi dalam masyarakat. Kedua, Kohesifitas: Adanya hubungan yang erat dan padu dalam membangun solidaritas masyarakat. Ketiga, Altruisme: Paham yang mendahulukan kepentingan orang lain. Perasaan tidak egois dan tidak individualistik yang mengutamakan kepentingan umum dan orang lain di atas kepentingan sendiri. Keempat, Gotong-royong: Sikap empati dan perilaku yang mau menolong orang lain dan bahu membahu dalam melakukan berbagai upaya untuk kepentingan bersama. Kelima. Jaringan, dan kolaborasi social :Membangun hubungan dan kerjasama antar individu dan antar institusi baik di dalam komunitas sendiri/ kelompok maupun di luar komunitas/ kelompok dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ridell, (1997) dalam Suharto (2007) menuliskan tiga parameter modal sosial : Pertama, Kepercayaan (trust): Harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat, yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kedua, Norma-norma (norms): Norma terdiri pemahaman-pemahaman,

nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Ketiga, Jaringan-jaringan (networks) : Merupakan infrastruktur dinamis yang berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama.

Menurut para pakar yang lain, Bourdieu (Jenkins, 2004) modal sosial adalah sekumpulan sumberdaya aktual atau potensial yang terkait dengan pemilikan suatu jejaring yang tahan lama dari hubungan-hubungan yang sudah terlembagakan yang berawal dari pengenalan dan pengakuan yang saling menguntungkan. Sedangkan bagi Coleman (1990) modal sosial dilihat berdasarkan fungsinya, yang bukan merupakan entitas tunggal tetapi terdiri dari berbagai entitas yang berbeda-beda, dengan dua karakteristik umum, yakni: (1) semuanya terdiri-dari atas beberapa aspek dari struktur sosial, dan (2) entitas-entitas tersebut memfasilitasi tindakan individu-individu yang ada dalam struktur tersebut. Seperti bentuk modal lainnya, modal sosial bersifat produktif, yang memungkinkan pencapaian beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya. Seperti modal fisik dan modal manusia, modal sosial tidak sepenuhnya dapat ditukar, tetapi dapat ditukar terkait dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Bentuk modal tertentu yang bernilai untuk memudahkan beberapa tindakan bisa jadi tidak berguna atau merugikan orang lain. Tidak seperti modal lainnya, modal sosial melekat pada struktur relasi di antara orang dan kalangan orang. (Haridison : 2014)

Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial adalah suatu kumpulan dari asosiasi-asosiasi yang bersifat horisontal di antara orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap produktivitas dari masyarakat setempat. Asosiasi-asosiasi yang dimaksud, termasuk jejaring dari pertalian warga masyarakat (civic engagement) dan norma-norma sosial. Asumsi yang mendasari konsep Putnam adalah: (1) jejaring dan norma-norma yang secara empiris saling terkait; dan (2) jejaring dan norma-norma dimaksud mempunyai konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang penting. Oleh sebab itu, ciri kunci dari modal sosial sebagaimana definisi Putnam adalah modal sosial memfasilitasi koordinasi dan kerja sama bagi keuntungan bersama (timbal balik) dari para anggota suatu asosiasi. (Haridison : 2014)

Selanjutnya teori tipe modal sosial menurut Woolcock dalam Rustanto (2007). Tiga tipe modal sosial menurut Woolcock (2001) adalah: (1) perekat sosial (*social bounding*) yaitu tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat atau adanya perekat sosial dalam suatu sistem kemasyarakatan, misalnya hubungan kekerabatan, (2) institusi atau

mekanisme (*social bridging*), merupakan suatu ikatan sosial sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompok. Jembatan sosial ini muncul karena adanya berbagai berbagai macam kelemahan yang ada di masyarakat, Stephen Aldidge menggambarkan sebagai “pelumas sosial” yaitu pelancar roda-roda penghambat jalannya modal sosial dalam sebuah komunitas. Wilayah kerjanya lebih luas daripada *social bounding*. *Social bridging* bisa bekerja lintas kelompok etnis, maupun kelompok kepentingan, dan (3) hubungan atau jaringan sosial (*social linking*) merupakan hubungan sosial yang dicirikan dengan adanya hubungan di antara status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya, hubungan antara elite politik dengan masyarakat umum.

Senada dengan pendapat diatas, Rustanto (2007) mengemukakan Setiap orang atau keluarga melakukan pengelompokkan sosial atas dasar masalah dan kebutuhan masing-masing. Kelompok sosial dianggap sebagai alat sosial bagi masyarakat untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya secara lebih efisien. Hal ini didukung oleh pendapat Etzioni (1992), bahwa melalui kelompok sosial dapat dikoordinasikan sejumlah besar tindakan manusia baik sebagai warga maupun keluarga. Pendekatan partisipatif dalam pengembangan masyarakat mengarahkan kesadaran kepada warga masyarakat untuk mengelompokkan diri dalam kelompok sosial. Menurut Ashley (1999) dan Mukherjee (2002), *Sustainable livelihood* (Sli) merupakan salah satu teknik penguatan kelompok secara partisipatif dalam pengembangan modal sosial bagi keluarga miskin. Prinsip Sli yaitu: (1) *people centered*, (2) *responsive and participatory*, (3) *multi level*, (4) *conducive in partnership*, (5) *sustainable*, dan (6) *dynamic*.

Argumentasi diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kamarni (2012) jaringan sosial sebagai bagian modal sosial yang berpengaruh terhadap kesejahteraan. Dan jaringan sosial adalah sebagai awal dari kelembagaan. Kelembagaan tersebut terutama kelembagaan pemasaran. Dimana kalau dilihat dari unsur penting dari modal sosial yaitu seperangkat hubungan melekat antar manusia dalam suatu kelompok sosial. Hubungan antar masyarakat bisa menjadi produktif sejauh yang diharapkan bersama, seperangkat nilai yang disepakati dan adanya sara saling percaya antara satu sama lain. Berdasarkan hasil kajian Kamarni unsur terpenting dari modal sosial dengan kesejahteraan Keluarga adalah bahwa unsur (1) persatuan kelompok: terdapat hubungan persatuan kelompok dengan kesejahteraan, (2) *trust* dan (3) partisipasi: dalam partisipasi dan *trust* dapat dilihat bahwa semakin luas interaksi (bentuk partisipasi) dalam persatuan kelompok maka semakin tinggi kesejahteraan.

Adapun pembangunan partisipatif berdasarkan asal bahasanya adalah diambil dari bahasa asing yaitu *participation*, yang artinya ikut serta. Adapaun secara definisinya Menurut

pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Maka keberadaan Modal sosial mencakup: institutions, relationships, attitudes dan values yang mengarahkan dan menggerakkan interaksi-interaksi antar orang dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan partisipatif di Kota Lhokseumawe. Modal sosial berlangsung melalui berbagai bentuk, antara lain melalui aliran informasi (contoh pembelajaran keahlian kerja, pertukaran ide di kelompok, dsb), norma hubungan timbal balik atau kerjasama mutual (menghubungkan masyarakat sejenis yang berlangsung terus menerus), tindakan kolektif, dan solidaritas yang didukung hubungan sosial. Bentuk-bentuk modal sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk kesediaan mereka bekerjasama, saling membantu, dan saling membangun pengertian

Oleh sebab itu modal Sosial yang tinggi, menurut Putnam (2002) membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai bentuknya. Akibat positif yang dihasilkan adalah pemerintah akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat (Hasbullah, 2006). Tingginya modal sosial akan mendorong efektifitas pemerintahan, beragam determinan memungkinkan negara berfungsi secara lebih efektif dan memiliki legitimasi. Modal sosial tinggi yang dimiliki masyarakat lebih dapat memfasilitasi hubungan antara negara dan rakyat. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menjamin stabilitas politik negara.

Di tingkat lokal, modal sosial dapat menjembatani hubungan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyebarkan informasi dan mengimplementasikan program-program pembangunan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, keterbukaan pemerintah pada masyarakat, adanya komitmen dan keinginan yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun, serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan akan mendorong terciptanya pembangunan sistem pemerintahan yang baik dimana akuntabilitas dan transparansi pemerintahan berimbang dengan akses dan kontrol masyarakat

terhadap pemerintahan. Hal ini juga dapat mendorong demokrasi tumbuh dari bawah dan memungkinkan pembangunan politik tidak hanya pada aras pusat tapi juga aras lokal.

Di samping itu, negara melalui sistem pemerintahan yang baik dapat mendorong menguatnya modal sosial yang mendukung berkembangnya kepercayaan, nilai-nilai, dan norma yang baik dengan menciptakan situasi yang kondusif dalam mempererat jaring-jaring sosial di dalam masyarakat dan merangsang tumbuhnya sikap proaktif masyarakat dalam pembangunan.

Berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi Asean Indonesia maka perlu dijelaskan Indonesia termasuk salah satu negara dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) yang akan bergulir mulai akhir tahun 2015 ini. MEA merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang sebelumnya telah disebut dalam *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* pada tahun 1992. Pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-5 di Singapura pada tahun 1992 tersebut para Kepala Negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. Kemudian dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. (www.tarif.depkeu.go.id)

Menurut Suroso (2015). Gambaran karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil; dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.

Dari karakter dan dampak MEA tersebut di atas sebenarnya ada peluang dari momentum MEA yang bisa diraih Indonesia. Dengan adanya MEA diharapkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara ASEAN lainnya. Pangsa pasar yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada MEA, pangsa pasar ASEAN sejumlah 625 juta orang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar yang lebih luas. Ekspor dan impor juga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas bekerja di Indonesia.

Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia (TKI) juga bisa bebas bekerja di negara-negara lain di ASEAN.

Dampak Positif lainnya yaitu investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Begitu pula kita dapat menarik investasi dari para pemodal-pemodal ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat dan para professional akan semakin meningkatkan tingkat skill, kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinya.

Namun, selain peluang yang terlihat di depan mata, ada pula hambatan menghadapi MEA yang harus kita perhatikan. Hambatan tersebut di antaranya : pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut *Global Competitiveness Index* (GCI) 2014, kualitas infrastruktur kita masih tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Apabila hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia.

MEA akan dapat mengatasi kesenjangan pada pembangunan dan melakukan percepatan integrasi kepada negara Laos, Myanmar, Vietnam dan Kamboja lewat Initiative for ASEAN integration dan inisiatif dari regional yang lainnya. Adapun bentuk kerjasamanya ialah pertama, Pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas, Kedua, Pengakuan terkait kualifikasi profesional, Ketiga, Konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi. Keempat, Memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan, Kelima, Meningkatkan infrastruktur dan melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN, Keenam, Memperpadukan segala industri yang ada diseluruh wilayah untuk dapat mempromosikan sumber daerah serta meningkatkan peran dari sektor swasta untuk dapat membangun MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.

C. Hasil Dan Pembahasan

Kota Lhokseumawe berdasarkan data BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2015 sebagai berikut. Kota ini resmi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Pada tanggal 21 Juni 2001, Dalam jangka waktu satu dekade lebih, Lhokseumawe terus melakukan pembangunan di pelbagai bidang kehidupan termasuk di bidang kependudukan. Pembangunan dilakukan baik dalam hal kuantitas dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe hasil proyeksi pada tahun 2015 adalah 191.407 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 95.271 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 96.136 jiwa yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,11 persen dari tahun 2014. Jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak dan memiliki kualitas yang baik adalah aset yang sangat bermanfaat dalam mendorong laju perekonomian.

Upaya pengendalian jumlah penduduk hendaknya terus diupayakan dalam rangka menciptakan tatanan keluarga kecil yang sehat dan berkualitas. Berikut disajikan komposisi penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2015 menurut kelompok umur dan jenis kelamin melalui grafik piramida penduduk: komposisi penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2015. Penduduk Kota Lhokseumawe dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 14 tahun) sebesar 31,60 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 65,72 persen, dan jumlah penduduk lansia (≥ 65 tahun) tergolong kecil yaitu 2,67 persen. Hal ini merupakan bonus demografi bagi Kota Lhokseumawe apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat angka beban ketergantungan (ABK). Pada tahun 2015 ABK di Kota Lhokseumawe sebesar 52,13 persen. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 52 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kota Lhokseumawe. ABT tersebut akan memacu penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya, yang pada gilirannya akan menjadi modal yang cukup baik mendorong

proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe (Sumber data: Lhokseumawe dalam angka Tahun 2015).

Berkaitan dengan penting peran modal sosial dalam pembangunan partisipatif di Kota Lhokseumawe dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean, maka Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Dengan saling percaya, toleransi, dan kerjasama mereka dapat membangun jaringan baik di dalam kelompok masyarakatnya maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Namun, sebaliknya modal yang rendah akan sangat sulit penyelesaian kompleksitas permasalahan terutama masalah pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data diatas meskipun Kota Lhokseumawe belum dapat dikatakan masyarakat yang sudah maju namun, potensi untuk kemajuan kota Lhokseumawe guna menghadapi MEA awal 2016 berdasarkan data kependudukan Kota Lhokseumawe, disamping itu masyarakat kota Lhokseumawe masih memiliki nilai-nilai tradisional berdasarkan observasi penulis, dan ini akan dapat memperkuat modal sosial karena pada masyarakat tradisional, telah diketahui memiliki asosiasi-asosiasi informal yang umumnya kuat dan memiliki nilai-nilai, norma, dan etika kolektif sebagai sebuah komunitas yang saling berhubungan. Hal ini merupakan modal sosial yang dapat mendorong munculnya organisasi-organisasi modern dengan prinsip keterbukaan, dan jaringan-jaringan informal dalam masyarakat yang secara mandiri dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup bersama dalam kerangka pembangunan masyarakat.

Berkembangnya modal sosial di tengah masyarakat kota Lhokseumawe akan menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, dan merangsang tumbuhnya empati dan simpati terhadap kelompok masyarakat di luar kelompoknya. Sebagaimana yang disampaikan Hasbullah (2006) memaparkan mengenai Jaringan-jaringan yang memperkuat modal sosial akan memudahkan saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan kelompok masyarakat. Hasilnya adalah lahirnya masyarakat yang peduli pada berbagai aspek dan dimensi aktifitas kehidupan, masyarakat yang saling memberi perhatian dan saling percaya. Situasi yang mendorong kehidupan bermasyarakat yang damai, bersahabat, dan tenteram. Demikian juga halnya dalam bidang jasa dan perikanan sebagai sektor andalan untuk Kota Lhokseumawe.

Namun demikian meskipun masyarakat Kota Lhokseumawe sebahagian termasuk masyarakat perkotaan namun, sebahagian lagi masih tergolong masyarakat yang dikategori pedesaan seperti Masyarakat yang berada Kecamatan Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu, secara umum kemampuan modal sosial (*social relationship*) dipedesaan masih kuat dan mengakar termasuk kesediaan dan saling membantu dalam pengerjaan usaha. Pembangunan pertanian akan berhasil apabila petani sebagai subjek pembangunan bergairah dan termotivasi untuk bekerja keras, motivasi akan menumbuhkan daya kreasi kerja dan kegotong-royongan diantara mereka yang pada gilirannya menumbuhkan modal sosial yang telah menjamin keberhasilan penerapan teknologi untuk keberlanjutan pembangunan di masa akan datang.

Modal sosial yang lemah mengundang munculnya pertentangan nilai dan menonjolnya rasa saling tidak percaya. Akan tetapi bila modal sosial yang tidak dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), bisa berakibat perhatian terhadap pentingnya kelangsungan hidup bersama dalam masyarakat menjadi terabaikan. Modal sosial dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, tidak sekedar jumlah tetapi kehidupan masyarakat yang lebih berarti. Dengan dimensi yang ada dalam modal sosial, persatuan, budaya/adat istiadat, kepercayaan dan partisipasi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Pontoh (2010) identifikasi dan analisis modal sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat. menggunakan pendekatan studi kasus guna mempelajari organisasi sosial ekonomi dan aspek yang terkait secara lebih mendalam. Bahwa karakter sosial budaya menjadi ciri atau karakter modal sosial dimasyarakat diketahui melalui pendekatan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat (Jasmy, 2006). Faktor internal mencakup: (a) pola organisasi sosial dalam suatu komunitas yang mencakup kepercayaan lokal, pola dan sistem produksi dan reproduksi serta politik lokal, dan (b) norma dan nilai-nilai yang melekat dalam komunitas.

Faktor eksternal dapat dirangkum dalam pengaruh agama, pendidikan serta sistem dan hubungan politik dan pemerintahan dengan luar komunitas. Namun dalam mengidentifikasi karakter sosial budaya masyarakat, penulis merinci faktor-faktor pemaparannya tersebut menjadi empat faktor. Faktor-faktor yang dipaparkan adalah: (1) faktor nilai dan norma masyarakat, (2) faktor kepercayaan dan organisasi loka, (3) faktor pola dan sistem produksi dan reproduksi, (4) faktor politik lokal. Dari aspek kepemimpinan, masyarakat menilai kepemimpinan berdasarkan wibawa dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Karakteristik kepemimpinan yang dimaksud menggiring kepada figur-figur atau tokoh-tokoh yang berlandaskan kemampuan ekonomi.

Berkaitan dengan apa yang disampaikan Pontoh, melihat faktor eksternal, yaitu kepemimpinan di Lhoksemawe ada kaitannya menurut hasil observasi penulis, dimana menurut data yang ada bahwa kepemimpinan yang lahir dari proses demokrasi yang baik akan menghasilkan para pemimpin yang terbaik dan mampuni, akan tetapi sebaliknya ketika proses pemilihan demokrasi tidak berjalan dengan baik maka akan mengurangi kualitas kepemimpinan yang ada.

Adapun data yang penulis dapatkan dari faktor kepemimpinan (modal sosial Politik) dalam upaya memperkuat pembangunan yang partisipatif di Lhokseumawe masih kurang baik hal ini dapat dilihat angka kekerasan pemilu di kota Lhokseumawe yang bersumber dari: Pemantauan Media Paralegal Pemilu Wilayah Aceh dan rilis press yang dilakukan oleh Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap Kekerasan dan Pelanggaran Pemilu di Aceh termasuk di kota Lhokseumawe di Jakarta, 18 Februari 2014 yang isinya antara lain “Gesekan politik ini tentu akan memperbesar peluang terjadinya pelanggaran pemilu. Tidak hanya pelanggaran administrasi dan pidana pemilu, potensi kekerasan dan intimidasi fisik juga sangat besar. Ini terlihat dari beberapa kasus yang terjadi di Aceh, kecenderungan bukan hanya pelanggaran pemilu namun lebih kepada kasus kekerasan dan intimidasi. Mulai dari antar peserta pemilu dan masing-masing pendukung, atau pun pendukung dengan pemilih dan masyarakat sipil pada umumnya. Bentuk perbuatannya terdiri dari teror bom, pembakaran, pembunuhan, pemukulan, penganiayaan. Bahwa segala tindakan ini sangat tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemilu.

Ditambahkan “Pemilu sebagai sarana perpindahan kekuasaan mestinya dijalankan dengan jalan damai. Rakyat diberikan ruang untuk mengekspresikan kedaulatannya dengan rasa aman dan nyaman sesuai dengan pertimbangan politiknya masing-masing. Berdasarkan persoalan tersebut, Kami menyatakan sikap sebagai berikut: Pertama, Mengecam tindak kekerasan dan intimidasi karena pemilih yang akan dirugikan. Kedua, Mendorong penyelenggara pemilu dan aparat Kepolisian untuk bertindak efektif, cepat, dan netral, guna mengantisipasi terjadinya kasus kekerasan, mengingat penyelenggaraan Pemilu 2014 sudah semakin dekat. Ketiga, Mendorong pihak Kepolisian di Aceh khususnya dan Kepolisian RI untuk menindak tegas para pelaku kekerasan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2014. Karena sejatinya, pemilu adalah upaya untuk mewujudkan kebersamaan dalam memilih pemimpin kedepan dan membawa kesejahteraan untuk semua masyarakat Indonesia”.

Sumber lain adalah Kekerasan Yang Terjadi Pada Tahun 2014 (Per Januari 2014) Media yang dipantau: serambinews.com dimana telah terjadi kekerasan atas nama pemilu

seperti kejadian: Sabtu, 11 Januari 2014, Sekitar Pukul 23.00 Jufrizal (27) kader Partai Nasional Aceh (PNA), asal Desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Sabtu (11/1) sekitar pukul 23.00 WIB mendatangi Polres setempat untuk melaporkan kasus penculikan dirinya oleh pria berinisial Bal. Dan Selasa, 29 Januari 2014 Jufrizal (20) yang memasang bendera Partai Nasional Aceh (PNA) di jalan Medan-Banda Aceh, tepatnya di kawasan Panggoi, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, dilaporkan telah dianiaya sekelompok pria, Selasa (29/1) sekitar pukul 19.00 WIB. Menyebabkan pria asal Panggoi tersebut sempat pingsan dan harus dirawat di sebuah rumah sakit di Kota Lhokseumawe.

Maka untuk memperkuat modal sosial dalam pembangunan partisipatif maka dipandang kekuatan Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat lihat sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesalingpercayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama kehadiran kepemimpinan dari proses demokrasi baik sangat diperlukan supaya pemimpin akan dapat memberikan ketauladanan yang baik dalam kehidupan sosial, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fukuyama menyatakan bahwa: “modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Di dalamnya merupakan komponen cultural bagi kehidupan masyarakat modern. Berbagai permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di berbagai Negara, determinan utamanya adalah kerdilnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan (trust) dalam sebuah komunitas”.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pandangan teoritis terhadap peran modal sosial dalam memperkuat pembangunan partisipatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean maka dapat dikatakan Modal sosial masyarakat Kota Lhokseumawe adalah Sumberdaya yang muncul dari hasil interaksi masyarakat Kota Lhokseumawe, baik antar individu maupun institusi yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan-hubungan timbal balik, dan jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk struktur masyarakat dan menjadi perekat antar anggota kelompok yang berguna untuk koordinasi dan

kerjasama dalam mencapai tujuan bersama pada dasarnya dimiliki oleh masyarakat Kota Lhokseumawe, namun, aspek modal sosial politik (kepemimpinan) yang ada kurang dalam merespon potensi modal sosial lainnya yang dimiliki, maka untuk kedepan perlu usaha keras pada level kepemimpinan untuk adanya perbaikan yang harus dimulai dengan proses demokrasi kepemimpinan yang lebih baik dari sekarang.

Sehingga apabila aspek penting dari kuatnya kepemimpinan yang pro-rakyat yang lahir dari rahim proses demokrasi yang baik sehingga Unsur modal sosial antara lain: Kepercayaan, Kohesifitas, Altruisme, Gotong-royong, Jaringan, dan kolaborasi social akan dapat digerakkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memperkuat pembangunan partisipatif. Bentuk-bentuk modal sosial diwujudkan dalam bentuk kesedian mereka bekerjasama, saling membantu, dan saling membangun pengertian akan teruk tumbuh dan berkembang, dan hal ini akan mempercepat kesiapan masyarakat dalam menggerakkan pembangunan yang partisipatif, sehingga untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean tidak menjadi permasalahan yang berarti terlebih lagi di kawasan Kota Lhokseumawe sudah ada beberapa lembaga pendidikan tinggi yang akan dapat melahirkan para ilmuwan yang bisa bersaing dilevel lokal, Nasional dan Internasional seperti Universitas Malikussaleh, Politeknik Negeri Lhokseumawe dan IAIN Lhokseumawe.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, Mas, Achmad. 1993. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi
- Bire Adriana, 2008. Peranan Modal Sosial Dalam Adopsi Teknologi Tanam Legowo Pada Kegiatan Prima Tani Di Kabupaten Kupang. Thesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Cox, Eva (1995). A Truly Civil Society. Sidney: ABC Books
- Coleman, J., 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Fukuyama, Francis (1999). The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demorasi Liberal. Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Suharto, Edy (2007). Modal Sosial dan Kebijakan Publik. Pdf (SECURED). 23/6/2015. 1:49PM
- Mubyarto et, al, 1997. Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kajian Bersama Pengembangan Kebijaksanaan, Yogyakarta: Aditya Media.
- Field J. 2010. Modal Sosial (Alih bahasa dari bahasa Inggris oleh Nurhadi). Bantul Kreasi Wacana 272 hal. Judul asli *Social Capital*
- Jenkins, Richard, 2004, Membaca Pikiran Pierre Bourdieu, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kamarni. 2012. Analisis Modal Sosial sebagai Salah Satu Upaya dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.3 No.3.
- Pontoh O. 2007. Identifikasi Dan Analisis Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis Vol. 6 No.3
- Rustanto B. 2007. Penguatan Keluarga Miskin Melalui Penguatan Modal Sosial. Jurnal Informasi Vol. 12 No. 3.
- Suharto, E. 2002, Metodologi Pengembangan Masyarakat. Community work in New Zealand. http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makind
- Suandi 2007. Modal Sosial dan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Daerah Perdesaan Provinsi Jambi. [Disertasi]. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Suroso G.T 2015, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan perekonomian Indonesia, Artikel Badiklat Keuangan. Jakarta. Kementerian Keuangan.
- Putnam, R.D. 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. American Prospect, 13, Spring, 35- 42. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. Foundation of Social Capital. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.

Hasbullah, Jousairi. 2006. Sosial Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Jakarta: MR United Press. Jenkins, Richard, 2004, Membaca Pikiran Pierre Bourdieu, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Haridison, Anyualatha. (2013). "Modal Sosial dalam Pembangunan". JISPAR. Volume 4: Universitas Palangka Raya.

Halil, Warda (2011). Memahami Modal Sosial dalam Pembangunan Pertanian. Buletin Balitbang Pertanian Sulsel.

Media Serambinews 2014. (SECURED). 23/10/2015. 10:31PM

Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Tahun 2014. (SECURED). 21/11/2015. 11:40PM

Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2015.